

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.B Susanto, Relevansi Pembangunan Ekonomi Daerah, (Semarang : Erlangga, 2010)
- Djohan Djohermansyah, Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990).
- Estiningsih Muji, Fungsi Pengawasan DPRD, (Yogyakarta : Atmajaya, 2005).
- Huda Ni'matul, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung : Nusamedia, 2012)
- Inosentius Syamsul, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD, (Jakarta: Adekasi, 2002).
- Kencana Syafie Inu, Sistem Politik Indoneisa, (Bandung : Rafika Aditama, 2005).
- Malik Piliang Akmal, Penguatan Pengawasan DPRD, (Bandung: PT Remaja Rosidaka, 2016).
- Misdayanti dan R.G. Kartasapoetra, Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Misdayanti dan Tutik Titik Triwulan, Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005).
- Romli, Lili, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- R.G. Kartasapoetra, Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993).
- Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soemitro, Roni Hanitijo, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Suparmoko Muhammad, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, (Jakarta : Andi Offset, 2002).

Suwanda Dadang, Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

Suwanda Dadang, Penguatan Pengawasan DPRD Pemerintahan Daerah yang Efektif, (Bandung :PT Remaja Rosdaka,2016)

Widjaja, Haw, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2005).

Jurnal

Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang – Undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Franklin Asido Rossevelt, “fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Era Otonomi Daerah”, Jurnal administrasi Publik, Vol. 2, No. 3 2004 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

H. Kemas Arsyad S, “DPRD Dalam Pemerintah Daerah Pasca Perubahan UUD 1945”, MMH, Jilid 40 No.4 2011 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Mutihia Kamilah, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Tahun 2014 Di Kota Balikpapan”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 5 2014 fisip-universitas mulawarman Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017

Wawancara

H. Agung Priyambodo, SE, ST, Wawancara, Anggota Dewan Komisi B, (Semarang : 9 November 2018)

Joko Susilo, Wawancara, Anggota Dewan Komisi B, (Semarang : 25 Oktober 2018)

V. Joko Riyanto, SE, Wawancara, Anggota Dewan Komisi D, (Semarang : 25 Oktober 2018)

Website

Cahyat Ade, "Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", www.cifor.cgiar.org (Diakses pada 21 September 2018).

DPRD Semarang, "Prioritas dan Plafon anggaran", <http://semarangkota.go.id/content/images./files/KUA> (Diakses pada 19 November 2018).

Zuhdiar Laeis, "Rendah, Serapan APBD Kota Semarang Baru 27,16 Persen", <https://jateng.antaranews.com/detail/rendah-serapan-apbd-kota-semarang-baru-2716-persen.html> (diakses pada 4 Juli 2018).